
PENGARUH POPULATION SIZE TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH: ANALISIS DATA PANEL PADA 24 KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020–2024 DALAM PERSPEKTIF FISCAL CAPACITY THEORY

***Masdar Ryketeng¹, Rendra Arief Hidayat²**

¹Accounting, Universitas Terbuka, Makassar

¹Accounting, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya

***Corresponding email: masdar.ryketeng@unm.ac.id**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh population size terhadap penerimaan pajak daerah pada 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan periode 2020–2024 dalam perspektif Fiscal Capacity Theory. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori dan metode analisis regresi data panel. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan realisasi APBD, dan dokumen keuangan daerah terkait penerimaan pajak daerah. Variabel penelitian terdiri atas population size sebagai variabel independen dan penerimaan pajak daerah sebagai variabel dependen. Analisis dilakukan menggunakan Common Effect Model dan Fixed Effect Model untuk menentukan pengaruh population size terhadap penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Common Effect Model, population size berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Namun, pada Fixed Effect Model, pengaruh tersebut menjadi tidak signifikan setelah mempertimbangkan heterogenitas masing-masing daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah penduduk, tetapi juga oleh karakteristik struktural dan institusional setiap wilayah. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan Fiscal Capacity Theory serta memperluas kajian mengenai hubungan faktor demografis dan kapasitas fiskal daerah dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia.

Keywords: population size, penerimaan pajak daerah, kapasitas fiskal, Fiscal Capacity Theory, data panel, Sulawesi Selatan

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal telah menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah. Dalam konteks otonomi daerah, pajak daerah dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan kemandirian fiskal sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah, meskipun kontribusinya terhadap PAD masih menunjukkan ketimpangan antarwilayah dan fluktuasi dari waktu ke waktu (Wujarso et al., 2022). Penelitian Siswati & Kaloeti (2024) menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak daerah pada beberapa pemerintah daerah telah mencapai kategori sangat efektif, bahkan melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, tingginya efektivitas tersebut tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan penerimaan yang optimal karena masih terbatasnya perluasan basis pajak daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah tidak hanya dipengaruhi oleh efektivitas administrasi perpajakan, tetapi juga oleh faktor struktural lain yang lebih kompleks, termasuk kondisi ekonomi, kapasitas institusional, dan karakteristik demografis daerah.

Dalam perkembangan literatur keuangan daerah, salah satu variabel yang semakin mendapatkan perhatian adalah population size atau jumlah penduduk. Variabel ini dipandang memiliki hubungan erat dengan kapasitas fiskal daerah karena jumlah penduduk berpotensi memperluas basis pajak melalui peningkatan konsumsi, aktivitas ekonomi, kepemilikan aset, dan permintaan terhadap layanan publik. Penelitian Sasongko et al. (2025) menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah karena peningkatan populasi cenderung meningkatkan aktivitas ekonomi regional. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Puri & Restikasari (2025) yang menyatakan bahwa dinamika populasi berkontribusi terhadap peningkatan PAD melalui perluasan basis fiskal daerah. Selain itu, penelitian Yasmine et al. (2025) menemukan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD, meskipun besarnya populasi belum tentu diikuti dengan optimalisasi penerimaan daerah apabila kondisi ekonomi masyarakat dan pasar tenaga kerja masih lemah. Dengan demikian, population size tidak hanya merepresentasikan besarnya jumlah penduduk secara kuantitatif, tetapi juga mencerminkan potensi ekonomi dan sosial yang memengaruhi kemampuan daerah dalam menghimpun penerimaan pajak.

Meskipun demikian, hubungan antara population size dan penerimaan pajak daerah masih menunjukkan inkonsistensi dalam berbagai penelitian empiris. Mahendra et

al. (2025) menemukan bahwa jumlah penduduk tidak mampu memperkuat hubungan antara pajak daerah dan PAD, bahkan cenderung melemahkan hubungan tersebut karena perubahan preferensi masyarakat terhadap layanan publik dan rendahnya kepatuhan pajak. Penelitian Bhaskara & Wijaya (2024) juga menunjukkan bahwa secara parsial population size tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, meskipun secara simultan bersama variabel lain tetap menunjukkan hubungan yang signifikan. Inkonsistensi ini mengindikasikan bahwa pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah bersifat kompleks dan tidak selalu linear. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya masih menggunakan pendekatan parsial dan belum mengintegrasikan population size ke dalam kerangka teoritis yang kuat, khususnya dalam perspektif Fiscal Capacity Theory. Akibatnya, mekanisme hubungan antara population size dan penerimaan pajak daerah masih belum dapat dijelaskan secara komprehensif

Dalam perspektif Fiscal Capacity Theory, kemampuan suatu daerah dalam menghimpun pendapatan tidak hanya ditentukan oleh potensi ekonomi, tetapi juga oleh kapasitas institusional, efektivitas tata kelola, dan kemampuan pemerintah dalam mengelola basis pajak secara efisien. Penelitian Bernardo et al. (2024) menegaskan bahwa diversifikasi sumber pajak, efisiensi administrasi, dan komitmen politik menjadi faktor utama dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Penelitian Vysochyna et al. (2022) juga menunjukkan bahwa kapasitas fiskal memiliki hubungan multidimensional dengan pembangunan ekonomi dan dipengaruhi oleh kondisi geografis serta struktur ekonomi wilayah. Dalam konteks yang lebih luas, Vom Hau et al. (2023) menekankan pentingnya kapasitas informasi pemerintah dalam membaca dan mengelola populasi sebagai basis utama mobilisasi penerimaan pajak. Selain itu, penelitian Beerli et al. (2022) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, persepsi keadilan, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, population size dalam perspektif Fiscal Capacity Theory tidak dapat dipahami hanya sebagai variabel demografis sederhana, melainkan sebagai bagian dari sistem kapasitas fiskal yang melibatkan interaksi antara faktor ekonomi, sosial, institusional, dan perilaku masyarakat

Selain persoalan teoritis dan empiris, terdapat pula kesenjangan kontekstual dalam penelitian terdahulu. Sebagian besar penelitian mengenai penerimaan pajak daerah masih berfokus pada wilayah Jawa atau kota-kota besar yang memiliki karakteristik ekonomi relatif maju. Padahal, setiap daerah memiliki struktur ekonomi, kapasitas fiskal, dan karakteristik demografis yang berbeda. Wilayah Sulawesi Selatan, khususnya pada level 24 kabupaten/kota, masih relatif jarang dijadikan objek penelitian dalam konteks hubungan population size dan penerimaan pajak daerah. Kondisi ini penting karena perbedaan karakteristik wilayah dapat menghasilkan hubungan yang berbeda antara jumlah penduduk dan kapasitas fiskal daerah. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada periode 2020–2024 yang merupakan periode pasca-pandemi COVID-19. Penelitian McDonald & Larson (2021) menunjukkan bahwa pandemi memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah akibat penurunan aktivitas ekonomi dan perubahan

pola konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian pada periode pasca-pandemi menjadi relevan untuk memahami bagaimana population size memengaruhi penerimaan pajak daerah dalam kondisi ekonomi yang mengalami transformasi struktural

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting dilakukan karena berupaya menjelaskan pengaruh population size terhadap penerimaan pajak daerah secara lebih komprehensif melalui perspektif Fiscal Capacity Theory. Penelitian ini juga bertujuan mengisi kesenjangan literatur dengan menggunakan pendekatan data panel pada 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan periode 2020–2024. Penggunaan data panel memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap dinamika hubungan antarvariabel baik secara temporal maupun antarwilayah. Selain itu, penelitian ini secara khusus mengisolasi pengaruh langsung population size tanpa menggunakan variabel kontrol sehingga efek utama variabel tersebut dapat diamati secara lebih jelas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian kapasitas fiskal daerah sekaligus memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan optimalisasi penerimaan pajak berbasis karakteristik demografis. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pengaruh population size terhadap penerimaan pajak daerah dalam perspektif Fiscal Capacity Theory pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan periode 2020–2024?”

TINJAUAN PUSTAKA

Fiscal Capacity Theory

Fiscal Capacity Theory merupakan salah satu pendekatan teoritis yang banyak digunakan untuk menjelaskan kemampuan pemerintah dalam menghimpun pendapatan guna membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Dalam konteks pemerintah daerah, kapasitas fiskal mencerminkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal, khususnya penerimaan pajak daerah. Teori ini menekankan bahwa kapasitas fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi ekonomi suatu wilayah, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas institusional, efektivitas tata kelola, struktur ekonomi, dan karakteristik demografis daerah (Bernardo et al., 2024; Vysochyna et al., 2022). Dengan demikian, kemampuan daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak tidak dapat dipahami hanya dari sisi administratif, tetapi harus dilihat sebagai hasil interaksi multidimensional antara sumber daya ekonomi, institusi, dan masyarakat.

Dalam perspektif Fiscal Capacity Theory, population size atau jumlah penduduk dipandang sebagai salah satu indikator penting dalam membentuk basis fiskal daerah. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah, maka semakin besar pula potensi aktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, kepemilikan aset, dan transaksi ekonomi yang dapat menjadi sumber penerimaan pajak daerah. Penelitian Vom Hau et al. (2023) menunjukkan bahwa

kapasitas pemerintah dalam mengelola informasi kependudukan dan aktivitas ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan mobilisasi pajak. Hal ini menunjukkan bahwa population size bukan hanya variabel demografis, tetapi juga mencerminkan tingkat keterbacaan (legibility) suatu wilayah oleh pemerintah dalam mengidentifikasi dan mengelola basis pajak. Oleh karena itu, dalam kerangka Fiscal Capacity Theory, jumlah penduduk menjadi bagian integral dalam pembentukan kapasitas fiskal daerah.

Selain itu, Fiscal Capacity Theory juga menekankan pentingnya faktor institusional dalam menentukan efektivitas pemungutan pajak daerah. Penelitian Beerli et al. (2022) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak masyarakat sangat dipengaruhi oleh persepsi keadilan, kualitas tata kelola, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, peningkatan jumlah penduduk tidak secara otomatis meningkatkan penerimaan pajak apabila tidak diimbangi dengan kualitas institusi yang memadai. Penelitian Bernardo et al., (2024) juga menegaskan bahwa efisiensi administrasi perpajakan dan diversifikasi sumber penerimaan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Oleh sebab itu, hubungan antara population size dan penerimaan pajak daerah harus dipahami dalam kerangka kapasitas fiskal yang bersifat kompleks dan multidimensional.

Population Size and Local Tax Revenue

Kajian mengenai hubungan antara population size dan penerimaan pajak daerah telah berkembang dalam literatur keuangan publik dan ekonomi regional. Secara teoritis, jumlah penduduk yang besar akan memperluas basis pajak karena meningkatnya aktivitas ekonomi, konsumsi rumah tangga, permintaan layanan publik, dan kepemilikan objek pajak. Penelitian Sasongko et al. (2025) menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah karena meningkatnya aktivitas ekonomi regional seiring pertumbuhan populasi. Temuan serupa dikemukakan oleh Regita Puri & Restikasari (2025) yang menyatakan bahwa dinamika populasi memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD melalui perluasan kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, population size dipandang sebagai determinan penting dalam meningkatkan kemampuan daerah menghimpun penerimaan pajak.

Penelitian Shaqi Yasmine et al. (2025) juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD, khususnya melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, penelitian tersebut menekankan bahwa besarnya jumlah penduduk belum tentu menghasilkan penerimaan pajak yang optimal apabila tidak didukung oleh kualitas ekonomi masyarakat dan kondisi pasar tenaga kerja yang baik. Temuan ini memperlihatkan bahwa population size tidak hanya mencerminkan kuantitas penduduk, tetapi juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi daerah. Dalam konteks ini, jumlah penduduk dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Meskipun sebagian besar penelitian menunjukkan hubungan positif antara population size dan penerimaan pajak daerah, hasil empiris yang diperoleh masih menunjukkan

inkonsistensi. Mahendra et al. (2025) menemukan bahwa jumlah penduduk tidak mampu memperkuat hubungan antara pajak daerah dan PAD, bahkan cenderung melemahkan hubungan tersebut. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perubahan preferensi masyarakat terhadap layanan publik serta rendahnya kepatuhan pajak menyebabkan peningkatan populasi tidak selalu diikuti dengan peningkatan penerimaan daerah. Hasil serupa ditemukan oleh Bhaskara Praja & Wijaya (2024) yang menunjukkan bahwa secara parsial population size tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa hubungan antara population size dan penerimaan pajak bersifat kondisional dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang bersifat ekonomi maupun institusional.

Dalam konteks internasional, penelitian Storonyanska et al. (2023) menunjukkan bahwa kapasitas pajak daerah dipengaruhi oleh struktur ekonomi, perilaku wajib pajak, dan sistem administrasi perpajakan yang berlaku. Penelitian Agrawal & Shybalkina (2023) juga menemukan bahwa transformasi ekonomi digital menyebabkan perubahan distribusi basis pajak antarwilayah, sehingga memengaruhi hubungan antara jumlah penduduk dan penerimaan pajak daerah. Selain itu, penelitian Tang et al. (2023) menunjukkan bahwa tekanan fiskal pemerintah dapat meningkatkan intensitas pemungutan pajak untuk mempertahankan kapasitas fiskal daerah. Penelitian Kotlińska (2025) dan Krawczyk-Sawicka (2025) menegaskan bahwa struktur sistem perpajakan dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas penerimaan pajak. Dengan demikian, hubungan antara population size dan penerimaan pajak daerah tidak dapat dipahami secara sederhana, tetapi harus dilihat dalam konteks kapasitas fiskal yang lebih luas.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. McDonald dan Larson (2020) menemukan bahwa pandemi menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang berdampak pada menurunnya penerimaan pajak daerah. Dalam konteks ini, population size dapat memiliki pengaruh yang berbeda pada periode pasca-pandemi dibandingkan periode normal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali hubungan antara population size dan penerimaan pajak daerah dalam konteks pasca-pandemi, khususnya pada wilayah yang memiliki karakteristik ekonomi dan demografis yang berbeda seperti Sulawesi Selatan.

Hypothesis Development

Dalam perspektif Fiscal Capacity Theory, jumlah penduduk merupakan bagian penting dalam membentuk kapasitas fiskal daerah karena berhubungan dengan perluasan basis pajak melalui peningkatan aktivitas ekonomi, konsumsi, dan kepemilikan objek pajak. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah, maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak yang dapat dihimpun oleh pemerintah daerah. Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa population size memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah dan PAD (Sasongko et al., 2025; Regita Puri & Restikasari,

2025; Shaqi Yasmine et al., 2025). Meskipun terdapat penelitian yang menunjukkan hasil tidak signifikan, secara teoritis population size tetap dipandang sebagai determinan penting kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Population Size berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatori yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh population size terhadap penerimaan pajak daerah dalam perspektif Fiscal Capacity Theory. Penelitian dilakukan pada 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2020–2024 menggunakan pendekatan data panel, yaitu kombinasi data cross-section dan time series. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan dinamika hubungan antarvariabel secara lebih komprehensif baik antarwilayah maupun antarperiode waktu. Populasi penelitian mencakup seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, sehingga penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh atau census sampling, di mana seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dokumen terkait penerimaan pajak daerah dan jumlah penduduk. Variabel independen dalam penelitian ini adalah population size yang diukur berdasarkan jumlah penduduk setiap kabupaten/kota, sedangkan variabel dependen adalah penerimaan pajak daerah yang diukur berdasarkan total realisasi penerimaan pajak daerah masing-masing pemerintah daerah selama periode penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan mengakses data statistik dan laporan keuangan daerah yang telah dipublikasikan secara resmi. Karena penelitian ini menggunakan data sekunder, instrumen penelitian berupa lembar dokumentasi dan format tabulasi data yang disusun untuk memastikan konsistensi pengumpulan data antarperiode dan antarwilayah. Validitas data dijaga melalui proses cross-checking antara sumber data resmi yang berbeda, seperti data BPS dan laporan keuangan pemerintah daerah, untuk memastikan kesesuaian informasi yang digunakan. Reliabilitas data dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh data berasal dari sumber resmi yang memiliki standar pengukuran dan pelaporan yang konsisten. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan teknik regresi data panel melalui tahapan pemilihan model terbaik, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect

Model (REM). Pemilihan model dilakukan menggunakan uji Chow dan uji Hausman untuk memperoleh model estimasi yang paling sesuai dengan karakteristik data penelitian. Selanjutnya, dilakukan pengujian signifikansi untuk mengetahui pengaruh population size terhadap penerimaan pajak daerah pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan periode 2020–2024.

Penelitian ini tidak melibatkan intervensi langsung kepada individu maupun penggunaan data personal responden karena seluruh data bersifat sekunder dan bersumber dari dokumen publik pemerintah. Oleh karena itu, penelitian tidak memerlukan perlakuan eksperimental ataupun penyebaran kuesioner kepada responden. Meskipun demikian, penelitian tetap memperhatikan prinsip etika penelitian dengan menggunakan data secara objektif, transparan, dan sesuai dengan sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh data yang digunakan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan akademik dan analisis ilmiah tanpa melakukan manipulasi ataupun penyalahgunaan informasi. Selain itu, penelitian ini menjaga integritas akademik melalui pencantuman sumber referensi secara tepat sesuai dengan kaidah sitasi ilmiah. Pendekatan metodologis ini diharapkan mampu menghasilkan analisis empiris yang akurat dalam menjelaskan hubungan antara population size dan penerimaan pajak daerah dalam perspektif Fiscal Capacity Theory.

PEMBAHASAN

Hasil

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian yang terdiri atas variabel population size dan penerimaan pajak daerah pada 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan selama periode 2020–2024. Jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 120 observasi.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Observasi	Mean	Minimum	Maximum
In Population Size	120	12.41	11.67	14.17
In Pajak Daerah	120	24.97	22.79	28.27

Berdasarkan Tabel 1, variabel In population size memiliki nilai rata-rata sebesar 12.41 dengan nilai minimum 11.67 dan maksimum 14.17. Sementara itu, variabel In pajak daerah memiliki rata-rata sebesar 24.97 dengan nilai minimum 22.79 dan maksimum 28.27.

Hasil Estimasi Common Effect Model (CEM)

Estimasi awal dilakukan menggunakan pendekatan Common Effect Model untuk melihat pengaruh langsung population size terhadap penerimaan pajak daerah.

Tabel 2. Hasil Estimasi Common Effect Model

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-statistic	p-value
Konstanta	13.984	1.456	9.604	0.000
In Population Size	0.885	0.117	7.545	0.000

Statistik Model

Statistik	Nilai
R ²	0.325
Adjusted R ²	0.319
F-statistic	56.920
Prob(F-statistic)	0.000

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel In population size memiliki koefisien sebesar 0.885 dengan nilai probabilitas 0.000.

Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

Estimasi berikutnya dilakukan menggunakan Fixed Effect Model untuk mengakomodasi heterogenitas antar kabupaten/kota.

Tabel 3. Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-statistic	p-value
Konstanta	25.941	0.842	30.810	0.000
In Population Size	-0.078	0.051	-1.520	0.133

Statistik Model

Statistik	Nilai
R ²	0.968
Adjusted R ²	0.959
F-statistic	109.432
Prob(F-statistic)	0.000

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel In population size memiliki koefisien sebesar -0.078 dengan nilai probabilitas sebesar 0.133.

Hasil Chow Test

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model terbaik antara Common Effect Model dan Fixed Effect Model.

Tabel 4. Hasil Chow Test

Statistik	Nilai
Cross-section F	83.320
Prob.	0.000

Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.000.

Ringkasan Hasil Pengujian Model

Tabel 5. Ringkasan Hasil Pengujian

Model	Koefisien Size	Population	p-value	Keterangan
Common Effect Model	0.885		0.000	Signifikan
Fixed Effect Model	-0.078		0.133	Tidak Signifikan

Berdasarkan hasil pengujian, model Fixed Effect Model dipilih sebagai model terbaik berdasarkan hasil Chow Test.

Pembahasan

Pengaruh Population Size terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Common Effect Model

Hasil estimasi menggunakan *Common Effect Model* menunjukkan bahwa *population size* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan periode 2020–2024. Koefisien positif yang dihasilkan menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk cenderung diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk berpotensi memperluas basis pajak daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi, konsumsi rumah tangga, kepemilikan objek pajak, serta meningkatnya permintaan terhadap layanan publik. Dalam konteks fiskal daerah, populasi yang besar menciptakan interaksi ekonomi yang lebih luas sehingga meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menghimpun penerimaan pajak. Signifikansi statistik yang ditunjukkan dalam model juga memperlihatkan bahwa *population size* memiliki hubungan empiris terhadap variasi penerimaan pajak daerah antarwilayah di Sulawesi Selatan. Dengan demikian, karakteristik demografis dapat dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam membentuk kapasitas penerimaan daerah.

Temuan ini sejalan dengan perspektif *Fiscal Capacity Theory* yang menjelaskan bahwa kapasitas fiskal daerah berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber daya ekonomi yang tersedia dalam wilayahnya. Dalam perspektif ini, jumlah penduduk mencerminkan skala potensi fiskal yang dimiliki suatu daerah. Daerah dengan populasi yang besar umumnya memiliki peluang lebih luas dalam menghimpun pajak karena aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat berlangsung lebih intensif. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sasongko et al. (2025), Regita Puri & Restikasari (2025), serta Shaqi Yasmine et al. (2025) yang menemukan bahwa *population size* berkontribusi positif terhadap kapasitas penerimaan daerah. Temuan ini juga memperkuat argumentasi bahwa faktor demografis bukan sekadar indikator statistik, tetapi merupakan komponen penting dalam pembentukan sumber daya fiskal daerah. Oleh karena itu, *population size* dapat dipahami sebagai salah satu determinan kapasitas fiskal dalam sistem otonomi daerah.

Dalam konteks regional, hubungan positif antara population size dan penerimaan pajak daerah juga terlihat pada wilayah perkotaan seperti Kota Makassar yang memiliki konsentrasi penduduk dan penerimaan pajak daerah tertinggi di Sulawesi Selatan. Wilayah perkotaan umumnya memiliki tingkat aktivitas ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan transaksi ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Akibatnya, konsentrasi penduduk cenderung memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan basis pajak. Sebaliknya, daerah dengan jumlah penduduk relatif kecil umumnya menunjukkan penerimaan pajak daerah yang lebih rendah karena keterbatasan aktivitas ekonomi dan objek pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsentrasi demografis dapat memengaruhi kesenjangan kapasitas fiskal antar daerah. Oleh sebab itu, population size menjadi indikator penting dalam memahami perbedaan kemampuan penerimaan daerah pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Ketidaksignifikanan Population Size pada Fixed Effect Model

Meskipun hasil *Common Effect Model* menunjukkan hubungan positif dan signifikan, hasil estimasi menggunakan *Fixed Effect Model* menunjukkan bahwa population size tidak lagi memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah setelah mempertimbangkan heterogenitas masing-masing daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja penerimaan pajak daerah. Dengan kata lain, penerimaan pajak daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya jumlah penduduk, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik spesifik masing-masing wilayah yang tidak dapat diamati secara langsung dalam model penelitian. Perubahan signifikansi antara model pooled dan fixed effect menunjukkan bahwa faktor struktural dan institusional antar daerah sangat beragam di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, jumlah penduduk saja belum cukup untuk menjelaskan perbedaan penerimaan pajak daerah apabila karakteristik unik masing-masing daerah diperhitungkan.

Temuan ini memperkuat perspektif multidimensional dalam *Fiscal Capacity Theory* sebagaimana dijelaskan oleh Bernardo et al. (2024) dan Vysochyna et al. (2022), yang menekankan bahwa kapasitas fiskal tidak hanya dipengaruhi oleh potensi ekonomi dan demografi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, efektivitas institusi, dan kemampuan administrasi fiskal daerah. Daerah dengan jumlah penduduk yang relatif sama dapat memiliki tingkat penerimaan pajak yang berbeda karena adanya perbedaan efisiensi administrasi, tingkat kepatuhan pajak, kualitas pelayanan publik, dan struktur ekonomi daerah. Dengan demikian, kemampuan pemerintah daerah dalam mengubah potensi demografis menjadi penerimaan fiskal sangat bergantung pada kualitas kelembagaan yang dimiliki. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Beerli et al. (2022) yang menegaskan pentingnya kualitas tata kelola dan tingkat kepercayaan masyarakat dalam menentukan efektivitas penerimaan pajak. Oleh sebab itu, population size sebaiknya dipahami sebagai potensi fiskal yang memerlukan dukungan institusional agar dapat memberikan dampak nyata terhadap penerimaan pajak daerah.

Ketidaksignifikanan *population size* pada *Fixed Effect Model* juga dapat mencerminkan adanya ketimpangan struktur ekonomi antarwilayah di Sulawesi Selatan. Beberapa daerah memiliki jumlah penduduk yang besar, tetapi belum didukung oleh tingkat industrialisasi dan produktivitas ekonomi yang tinggi sehingga kapasitas fiskalnya tetap terbatas. Sebaliknya, terdapat daerah dengan populasi lebih kecil tetapi mampu menghasilkan penerimaan pajak yang relatif tinggi karena memiliki sektor ekonomi yang lebih produktif atau sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya populasi, tetapi juga oleh kualitas dan produktivitas ekonomi masyarakatnya. Dengan demikian, peningkatan jumlah penduduk tidak secara otomatis meningkatkan penerimaan pajak daerah tanpa adanya transformasi ekonomi dan penguatan tata kelola fiskal. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengembangan kapasitas fiskal daerah memerlukan kombinasi antara pertumbuhan demografis, pembangunan ekonomi, dan efektivitas institusi pemerintahan.

Konteks Fiskal Pasca-Pandemi

Penelitian ini dilakukan pada periode 2020–2024 yang merupakan fase pemulihan pasca-pandemi COVID-19. Pandemi memberikan dampak besar terhadap aktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, dan kinerja fiskal pemerintah daerah. McDonald & Larson (2021) menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan signifikan pada penerimaan pajak daerah akibat menurunnya transaksi ekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Dalam konteks Sulawesi Selatan, kapasitas pemulihan fiskal antar daerah menunjukkan perbedaan yang cukup besar tergantung pada ketahanan ekonomi dan kemampuan pengelolaan fiskal masing-masing pemerintah daerah. Oleh karena itu, hubungan antara *population size* dan penerimaan pajak daerah pada periode pasca-pandemi dapat berbeda dibandingkan kondisi ekonomi normal.

Konteks pasca-pandemi juga menunjukkan pentingnya kemampuan adaptasi pemerintah daerah dalam mengelola kapasitas fiskal. Populasi yang besar dapat meningkatkan tekanan fiskal karena pemerintah harus menyediakan layanan publik yang lebih luas selama proses pemulihan ekonomi. Namun demikian, tanpa administrasi fiskal yang efisien dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan jumlah penduduk belum tentu mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah. Kondisi ini dapat menjelaskan mengapa pada *Fixed Effect Model population size* tidak menunjukkan pengaruh signifikan setelah karakteristik daerah diperhitungkan. Dengan demikian, pemulihan fiskal pasca-pandemi tampaknya lebih dipengaruhi oleh ketahanan institusional dan ekonomi daerah dibandingkan oleh besarnya populasi semata.

Implikasi terhadap Fiscal Capacity Theory

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan Fiscal Capacity Theory dengan menunjukkan bahwa *population size* memiliki hubungan langsung sekaligus hubungan kondisional terhadap penerimaan pajak daerah. Pada estimasi

pooled/common effect, jumlah penduduk terlihat memperkuat kapasitas fiskal melalui perluasan basis ekonomi dan basis pajak. Namun setelah heterogenitas daerah diperhitungkan, faktor demografis saja tidak cukup menjelaskan variasi penerimaan pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal terbentuk melalui interaksi antara sumber daya demografis dan efektivitas institusi pemerintahan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mendukung pandangan bahwa kapasitas fiskal merupakan konstruksi multidimensional yang melibatkan faktor demografi, ekonomi, dan tata kelola secara simultan.

Penelitian ini juga memberikan bukti empiris dari konteks kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang masih relatif jarang dibahas dalam literatur sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada wilayah perkotaan besar atau daerah di Pulau Jawa, sedangkan Sulawesi Selatan memiliki karakteristik ekonomi dan demografis yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan geografis kajian kapasitas fiskal di Indonesia. Selain itu, dengan memfokuskan analisis pada pengaruh langsung *population size* tanpa menggunakan variabel kontrol tambahan, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efek demografis murni dalam sistem fiskal daerah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun empiris terhadap literatur keuangan daerah dan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *population size* terhadap penerimaan pajak daerah pada 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan periode 2020–2024 dalam perspektif *Fiscal Capacity Theory*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada estimasi *Common Effect Model*, *population size* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk berpotensi memperluas basis fiskal daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, dan objek pajak yang dapat dihimpun oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, jumlah penduduk dapat dipandang sebagai salah satu sumber daya strategis dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Hasil ini juga memperkuat argumentasi bahwa faktor demografis memiliki keterkaitan erat dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun penerimaan pajak di era desentralisasi fiskal.

Namun demikian, hasil estimasi menggunakan *Fixed Effect Model* menunjukkan bahwa pengaruh *population size* menjadi tidak signifikan setelah heterogenitas masing-masing daerah diperhitungkan. Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya jumlah penduduk, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan institusional yang berbeda pada setiap kabupaten/kota. Perbedaan kualitas tata kelola, efektivitas administrasi perpajakan,

tingkat kepatuhan pajak, dan struktur ekonomi daerah terbukti memiliki peranan penting dalam menentukan efektivitas penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, *population size* tidak dapat dipandang sebagai determinan tunggal penerimaan pajak daerah, melainkan sebagai potensi fiskal yang memerlukan dukungan kelembagaan dan ekonomi yang memadai agar dapat dioptimalkan. Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah bersifat multidimensional dan terbentuk melalui interaksi antara faktor demografi, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan Fiscal Capacity Theory dengan menunjukkan bahwa hubungan antara *population size* dan penerimaan pajak daerah bersifat langsung sekaligus kondisional. Penelitian ini memperlihatkan bahwa jumlah penduduk memang mampu memperluas basis fiskal daerah, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan kapasitas masing-masing wilayah. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam konteks daerah di luar Pulau Jawa, khususnya Sulawesi Selatan, yang masih relatif jarang dibahas dalam literatur keuangan daerah sebelumnya. Dengan menggunakan pendekatan data panel pada periode pasca-pandemi COVID-19, penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai bagaimana dinamika demografi berinteraksi dengan kapasitas fiskal daerah pada masa pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini memperkaya literatur mengenai penerimaan pajak daerah dan kapasitas fiskal pemerintah daerah di Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen, yaitu *population size*, sehingga belum mampu menangkap pengaruh faktor ekonomi, institusional, dan sosial lainnya terhadap penerimaan pajak daerah. Kedua, penelitian ini hanya berfokus pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi secara nasional. Ketiga, penelitian ini menggunakan data sekunder agregat sehingga belum mampu menjelaskan perilaku wajib pajak dan efektivitas administrasi perpajakan secara lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model penelitian dengan memasukkan variabel lain seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kualitas tata kelola, tingkat kepatuhan pajak, digitalisasi perpajakan, atau tingkat urbanisasi agar mampu menjelaskan kapasitas fiskal daerah secara lebih komprehensif. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat memperluas cakupan wilayah penelitian, menggunakan pendekatan spasial atau metode panel dinamis, serta membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pandemi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara demografi dan kapasitas fiskal daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, D. R., & Shybalkina, I. (2023). Online shopping can redistribute local tax revenue from urban to rural America. *Journal of Public Economics*, 219. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2022.104818>
- Beerli, I., Zaidan, A., & Zeedan, R. (2022). Willingness to pay taxes through mutual trust: The effect of fairness, governability, tax-enforcement and outsourcing on local tax collection rates. *Governance*, 35(4), 1229–1252. <https://doi.org/10.1111/gove.12662>
- Bernardo, H., Canales, G., Challco, J. M., Cubas, W. E. V., Roger, F., & Flores, F. (2024). Financing of municipal current expenditure through local taxes: a systematic review. *QUBAHAN ACADEMIC JOURNAL*, 4(4), 2024. <https://doi.org/10.48161/qaj.v4n3a985>
- Bhaskara Praja, R., & Wijaya, S. (2024). *THE EFFECT OF POPULATION SIZE AND NUMBER OF MOTOR VEHICLES ON LOCAL TAX REVENUE WITH GRDP AS A MODERATING VARIABLE* (Vol. 4, Number 1).
- Kotlińska, J. (2025). Agricultural Tax: An (Un)Reliable Source of Local Government Revenues in Poland. *Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration*, 30(2), 181–210. <https://doi.org/10.18290/pepsi-2024-0015>
- Krawczyk-Sawicka, A. (2025). Local Taxes as a Source of Own Revenue for Municipalities in Poland –2020 Vs. 2024. *Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration*, 30(2), 211–224. <https://doi.org/10.18290/pepsi-2024-0016>
- Mahendra, I. B., Prabhawa, S., Surasmi, I. A., Made, I., Putra, W., Bagus, I., Putra, U., Luh Anik, N., Ningsih, P., Nengah, N., Ekayani, S., & Management, M. (2025). Studies Management and Finance Economics, of Journal The Effect of Local Taxes and Levies on Local Revenue with Population as a Moderating Variable in City Districts in Bali Province. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 08(04). <https://doi.org/10.47191/jefms/v8>
- McDonald, B. D., & Larson, S. E. (2021). Implications of the coronavirus on sales tax revenue and local government fiscal health. *Journal of Public and Nonprofit Affairs*, 6(3), 377–400. <https://doi.org/10.20899/JPNA.6.3.377-400>
- Regita Puri, S., & Restikasari, W. (2025). *Optimizing Regional Revenue: The Impact of Taxes, Levies, GRDP, and Population Dynamics in East Java's Regencies*. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/>
- Sasongko, W. A., Windhani, K., Wibowo, A. A., & Kanugroho, W. (2025). *DETERMINANTS OF REGIONAL TAX REVENUE REALIZATION IN MAGELANG CITY* (Vol. 01, Number 01).
- Shaqi Yasmine, D., Andri Wibowo, A., & Munggiarti, A. (2025). *DETERMINANTS OF LOCAL REVENUE IN BANYUMAS REGENCY* (Vol. 01, Number 01).
- Siswati, S., & Kaloeti, A. K. (2024). Effectiveness, Growth Rate and Contribution of Local Tax Revenue, Local Retribution, Results of Management of Separated Regional

- Wealth and Other Legitimate Local Revenue to Kediri District Local Revenue. *KINERJA*, 28(2), 252–269. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v28i2.8664>
- Storonyanska, I., Patytska, K., Medynska, T., Benovska, L., Kliuchnyk, L., & Nestor, O. (2023). SYSTEMIC PREREQUISITES FOR SHAPING THE LOCAL BUDGETS' TAX REVENUE: THE CASE STUDY OF DEVELOPED COUNTRIES. *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*, 6(53), 58–69. <https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.53.2023.4204>
- Tang, W., Zhao, X., Zhai, S., & Cao, L. (2023). Local government debt and corporate tax burden: A perspective based on the trade-off of government tax collection and management. *PLoS ONE*, 18(7 July). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0287763>
- Vom Hau, M., Peres-Cajías, J. A., & Soifer, H. D. (2023). No taxation without informational foundation: On the role of legibility in tax state development. *Journal of Institutional Economics*, 19(3), 426–443. <https://doi.org/10.1017/S1744137422000534>
- Vysochyna, A., Molotok, I., Babenko, V., Merezko, V., Holynska, O., & Rud, I. (2022). *Impact of Municipal Financial Resilience on Sustainable Economic Development: Case of Ukraine*.
- Wujarso, R., Saprudin, S., Sianipar, A. Z., Andhityara, R., & Napitupulu, A. M. P. (2022). Improving Local Government Performance Through Tax Optimization. *Journal of Governance*, 7(1). <https://doi.org/10.31506/jog.v7i1.14535>